

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendukung perekonomian dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Melalui fungsi intermediasi ini memperlancar penyaluran dana dari masyarakat yang memiliki cukup uang kepada masyarakat yang membutuhkan dana sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Perbankan nasional memegang peranan sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara dan diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk mendukung kegiatannya dan menjaga agar roda perekonomian tetap berputar (Dewi et al, 2015).

Stabilitas dan kesehatan bank merupakan salah satu indikator penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta keberlangsungan sistem keuangan. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsi keuangannya secara efisien dengan mengelola risiko, menjaga likuiditas, dan mempertahankan profitabilitasnya, serta dapat terus memberikan layanan keuangan yang efektif. Kesehatan lembaga keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kelancaran sistem

keuangan. Jika bank mengalami masalah dengan kesehatannya, seperti kredit macet atau modal yang tidak mencukupi akan dapat mempengaruhi stabilitas seluruh sistem keuangan. Untuk memastikan hal ini, berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengawasan dan penilaian terhadap kesehatan bank di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama BI sebagai otoritas moneter dan OJK sebagai otoritas pengawasan sektor keuangan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat umum.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter dan pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan, mengatur jumlah uang beredar, dan mengawasi likuiditas perbankan untuk memastikan bahwa sistem keuangan berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, Bank Indonesia bertindak sebagai *lender of the last resort*, menyediakan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan untuk mencegah krisis sistemik.

Bersamaan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam menjaga kesehatan perbankan melalui pengawasan dan regulasi yang ketat. OJK menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang mengevaluasi empat aspek utama yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings*, dan *Capital*. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank mampu menahan berbagai risiko dan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kestabilan dan kesehatan bank tidak

hanya penting bagi kelangsungan industri perbankan, tetapi juga bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Penilaian tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi internal dan eksternal bank serta potensi resikonya di masa mendatang. Metode RGEC memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kondisi bank, termasuk identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Suatu perbankan akan memperoleh status sebagai perbankan yang memiliki kinerja baik jika kategori kesehatan bank juga baik. Menurut Korompis (2015) bank yang memiliki tingkat kinerja yang baik dianggap berada dalam kategori sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bank yang sehat membantu menjaga serta mempertahankan kepercayaan publik, memenuhi fungsi intermediasi, dan menjamin pembayaran yang lancar. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Sektor perbankan antara satu dengan perbankan lain akan memiliki status tingkat kesehatan yang berbeda. Laporan keuangan tahunan yang dianalisis dapat membantu untuk mengetahui kondisi kesehatan bank. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk mendapatkan informasi sehingga membantu penggunaannya dalam membuat keputusan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menghitung rasio keuangan yang umumnya digunakan sebagai landasan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank

adalah lembaga keuangan yang berwenang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit dan sarana lainnya, sehingga dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat. Perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya bergantung kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tata kelola bank sangat penting untuk menjaga kesehatan bank dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Bank yang kesehatannya kurang baik dapat menimbulkan ancaman tidak hanya bagi lembaga keuangan itu sendiri tetapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kesehatan bank dapat diukur dengan berbagai aspek dengan tujuan untuk melihat apakah bank tersebut pada keadaan yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat ataupun tidak sehat.

Salah satu metode penilaian tingkat kesehatan bank yang saat ini digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). RBBR merupakan pendekatan penilaian kesehatan bank yang menitikberatkan pada prinsip manajemen risiko dan efektivitas tata kelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penilaian ini mencakup empat faktor utama yang disingkat RGEC, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings*, dan *Capital*.

Perbankan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari berbagai macam risiko atau dikenal dengan *Risk Profile*. *Risk Profile* adalah aspek yang menilai risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian ini mencakup delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan,

dan reputasi. Evaluasi terhadap risiko-risiko ini penting untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif dan mampu menghadapi potensi kerugian yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Profil risiko dapat dinilai dengan menggunakan beberapa rasio seperti NPL (*Non Performing Loan*) yang merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur, LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang mengukur seberapa besar jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan total simpanan yang dimiliki bank, IRR (*Interest Rate Risk*) yang mengukur risiko yang dihadapi bank dari perubahan suku bunga terhadap keuntungan dan kehilangan di masa depan, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang menggambarkan efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Namun dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan hanya dua rasio yaitu rasio NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Rasio NPL dan LDR merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur *risk profile* karena keduanya secara langsung mencerminkan kualitas kredit dan likuiditas suatu bank. Bank yang memiliki NPL yang tinggi atau LDR yang tidak seimbang dapat menghadapi kesulitan besar dalam mengelola risiko yang dihadapi, terutama pada masa krisis ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan Alfaroqi et al (2023) untuk membandingkan kondisi kesehatan bank sebelum dan selama pandemi pada PT BNI juga menggunakan rasio NPL dan LDR dalam pengukuran *Risk Profile* nya dengan hasil yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi kesehatan bank BNI sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Faktor kedua adalah *Good Corporate Governance* (GCG), yang menilai kualitas tata kelola perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Berdasarkan SE BI No.15/15/DPNP Tahun 2013 penilaian GCG harus dilakukan melalui *self assessment* oleh bank secara berkala dan dievaluasi oleh OJK untuk memastikan bahwa bank menjalankan praktik tata kelola yang baik, yang penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan operasional bank. Dalam penelitian yang dilakukan untuk membandingkan tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia oleh Ayla et al (2023) menunjukkan adanya perbedaan kondisi kesehatan bank dalam aspek GCG sebelum dan saat pandemi.

Faktor ketiga adalah *Earnings*, yang menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan dan efisiensi operasional. Indikator yang digunakan meliputi *Return on Assets* (ROA) yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari asetnya, *Net Interest Margin* (NIM) yang mengukur persentase laba bersih perusahaan terhadap penjualan bersihnya, dan *Return On Equity* (ROE) yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modalnya. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa bank memiliki profitabilitas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan terhadap tekanan keuangan. Namun dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanya rasio *Return on Assets* (ROA) karena dianggap paling objektif sebab tidak dipengaruhi oleh struktur modal atau tingkat leverage, berbeda dengan *Return on Equity* (ROE) yang dapat terdistorsi oleh penggunaan utang (Dendawijaya, 2009). Dalam konteks

perbankan, ROA menjadi sangat relevan karena mencerminkan sejauh mana kinerja operasional bank berkontribusi terhadap laba bersih, terlepas dari komposisi modal yang digunakan. Menurut Azmi et al (2021) dalam penelitiannya untuk membandingkan tingkat kesehatan bank syariah menunjukkan adanya perbedaan kondisi kesehatan bank syariah dalam aspek ROA sebelum dan saat terjadinya pandemi.

Faktor terakhir adalah *Capital*, yang menilai kecukupan modal bank dalam menanggung risiko yang dihadapi. Menurut Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017, CAR digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan seberapa besar daya tahan permodalan bank terhadap risiko sistemik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan modal yang dimiliki bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), di mana semakin tinggi CAR menunjukkan semakin kuat permodalan bank. Modal yang kuat penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan melindungi deposan serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Warsono et al (2022) untuk membandingkan kinerja keuangan Bank Mandiri dan Bank BTN menunjukkan adanya perbedaan kondisi kesehatan bank dalam aspek CAR sebelum dan saat pandemi.

Metode ini memungkinkan analisis yang sistematis dan objektif terhadap kondisi internal bank serta kemampuannya menghadapi risiko selama dan setelah krisis. Beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh Iswari (2023) dalam penelitiannya yang menganalisis tingkat kesehatan bank BPD Bali menggunakan metode RGEC dikatakan bahwa BPD Bali tetap dalam kategori “Sangat Sehat” pada periode 2020- 2022. Akan tetapi terdapat perbedaan nilai

komposit dan fluktuasi dalam komponen RGEC, yang menandakan adanya pengaruh nyata dari kondisi pandemi terhadap kesehatan bank. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Alfaroqi et al (2023) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kesehatan Bank Negara Indonesia (BNI), terutama pada aspek *Risk Profile*, *Earnings*, dan *Capital*. Melalui analisis menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), ditemukan bahwa terdapat perbedaan kondisi kesehatan Bank BNI antara sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 pada aspek *Risk Profile* yang dinilai menggunakan rasio NPL untuk risiko kredit dan LDR untuk risiko likuiditas, serta aspek *Earnings* yang dinilai menggunakan rasio ROA, dan aspek *Capital* yang dinilai menggunakan rasio CAR. Namun, dalam aspek *Good Corporate Governance* (GCG), tidak terdapat perbedaan kondisi kesehatan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ayla et al (2023) yang dalam penelitiannya terhadap Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19 dari tahun 2016 sampai tahun 2023 dengan menggunakan indikator NPF, FDR, GCG, BOPO, dan CAR. Sedangkan indikator ROA dan ROE menunjukkan tidak terdapat perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19. Serta penelitian oleh Ma'ruf (2019) yang menganalisis kinerja keuangan dengan metode RGEC pada PT BPD Se Indonesia pada periode 2015-2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPD di Indonesia selama periode 2015-2017 mendapatkan penilaian yang sehat.

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan untuk menganalisis kesehatan bank umumnya lebih berfokus pada Bank Umum atau Bank Pembangunan Daerah, sementara kajian mendalam mengenai Bank Perekonomian Rakyat khususnya BPR Bank Kertiawan masih sangat terbatas terutama dalam konteks krisis dan pemulihan pasca-pandemi. Padahal, sebagai bagian dari sistem keuangan lokal di Bali, BPR memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian rakyat kecil dan menengah.

Di tingkat lokal, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berperan penting dalam mendukung sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan perdagangan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami perubahan nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya peran BPR sebagai lembaga keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Penyaluran kredit oleh BPR juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat dan berperan dalam menggerakkan sektor perekonomian rakyat (Mahadewi et al., 2023).

Pandemi telah memberikan tekanan berat terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali, dengan lebih dari 14,28% penduduk Bali menggantungkan mata pencahariannya pada sektor akomodasi dan makan minum, yang merupakan bagian utama dari industri pariwisata

(BPS, 2024). Penurunan drastis jumlah wisatawan selama pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor ini, yang selanjutnya berdampak pada daya beli dan kemampuan membayar pinjaman. Kondisi ini secara langsung meningkatkan risiko kredit di lembaga keuangan seperti BPR. Hal ini tercermin dalam data BPR di Bali secara umum, di mana rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) meningkat signifikan menjadi 7,47% pada Desember 2020, melebihi ambang batas sehat yang ditetapkan oleh OJK (Wiratmini, 2021). Bahkan pada April 2020, NPL sempat melonjak hingga 8,92% (NusaBali, 2020).

Pada saat yang sama, rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan tajam dari 2,71% menjadi -0,74% dalam rentang waktu Desember 2019 hingga Juni 2020 (Yudiatmaja & Trianasari, 2024). Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh BPR juga mengalami penurunan pertumbuhan dari 15,17% pada 2019 menjadi hanya 4,80% pada April 2020 (NusaBali, 2020), sedangkan penyaluran kredit menurun dari 8,3% menjadi 5,59% pada periode yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya menekan sektor riil, tetapi juga sistem keuangan mikro yang menopang aktivitas ekonomi lokal, khususnya UMKM.

PT BPR Bank Kertiawan merupakan BPR yang aktif beroperasi di Bali dan memiliki keterkaitan erat dengan sektor UMKM yang terdampak langsung oleh pandemi. Selain itu, BPR Bank Kertiawan menunjukkan dinamika keuangan yang menarik, seperti fluktuasi rasio kredit bermasalah (NPL), perubahan tingkat profitabilitas, dan pergeseran struktur permodalan. Hal ini menjadikan BPR Bank Kertiawan sebagai objek yang tepat untuk dianalisis

menggunakan pendekatan RGEC dalam rangka memahami bagaimana bank menghadapi dan beradaptasi terhadap krisis maupun pemulihan ekonomi.

Pada kasus BPR Bank Kertiawan, data keuangan menunjukkan fluktuasi signifikan pada indikator RGEC selama periode 2020–2023. Terjadi peningkatan risiko kredit macet (*Non-Performing Loans/NPL*) karena banyak debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat penurunan pendapatan. Selain itu, permintaan kredit baru menurun karena ketidakpastian ekonomi dan penurunan aktivitas bisnis. Hal ini tentu berkaitan dengan lingkup pelayanan bank BPR yang lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena status Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan asuransi, sehingga sumber perputaran uang yang utama bersumber dari kredit (Adnyani & Musmini, 2022). Hal ini juga berdampak pada penurunan pendapatan bunga bank dan melemahnya profitabilitas. Meskipun terjadi tekanan pada masa pandemi, terdapat tanda-tanda pemulihan pada 2022 dan 2023, termasuk peningkatan laba, penurunan NPL, serta pertumbuhan simpanan dan aset. Memasuki tahun 2022, pemerintah Indonesia mulai melonggarkan kebijakan pembatasan dan secara bertahap mengalihkan fokus dari penanganan pandemi ke pemulihan ekonomi. Aktivitas bisnis mulai normal kembali, masyarakat kembali bertransaksi, dan kebijakan moneter kembali ke arah stabilisasi. Tahun 2022 dan 2023 secara luas diakui sebagai periode pasca pandemi, ditandai dengan pencabutan kebijakan PPKM, dimulainya transisi ke fase endemi, serta pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Mei 2023 yang mencabut status darurat kesehatan global COVID-19. Dalam

konteks tersebut, sektor perbankan mulai memasuki fase pemulihan yang ditandai dengan membaiknya indikator keuangan seperti ROA, GCG, dan efisiensi operasional.

Berdasarkan Kinerja keuangan pasca pandemi, ada sembilan BPR di Bali yang mendapat peringkat TOP 100 BPR pada tahun 2024 yang menunjukkan kemampuan bank dalam memulihkan kondisi keuangannya pasca pandemi yang diukur dari kondisi keuangan bank pada September 2021 hingga September 2023. Dari 9 BPR tersebut, penelitian ini akan berfokus pada kondisi keuangan BPR yang berlokasi di Denpasar yang merupakan pusat dari sektor pariwisata yang merasakan dampak pandemi covid-19 secara signifikan.

Di Denpasar ada dua BPR yang mendapatkan penghargaan TOP 100 BPR 2024 yaitu PT BPR Hoki dengan peringkat 9 dan PT BPR Bank Kertiawan dengan peringkat 63.

Tabel 1. 1

Komparasi Kinerja Keuangan PT BPR Bank Kertiawan dan PT BPR Hoki Berdasarkan Data Terbuka Tahun 2023

Indikator (2023)	PT BPR Bank Kertiawan	PT BPR Hoki
NPL	5.51	Tidak tersedia
LDR	96.72	Tidak tersedia
ROA	3.34	Tidak tersedia
CAR	31.81	Tidak tersedia
Transparansi Laporan	Tersedia (2020-2023)	Tidak tersedia publik

Sumber: Data Sekunder ([bankkertiawan.com](http://bankkertiawan.com) dan <https://www.hokibank.co.id/>)

Dari data tabel diatas diputuskan pada penelitian ini, PT BPR Bank Kertiawan dipilih untuk dianalisis karena ketersediaan data, dinamika keuangan selama-pandemi, relevansi lokal, serta kemudahan integrasi dengan metode RGEC. Sementara BPR lainnya mungkin memiliki aset lebih besar, namun tidak menunjukkan keterbukaan data dan dinamika fluktuasi yang kuat untuk dianalisis dalam konteks perbandingan kinerja selama dan pasca

pandemi. Berikut ini kondisi keuangan PT BPR Bank Kertiawan tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2  
Data Keuangan PT BPR Bank Kertiawan Tahun 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Kredit yang diberikan	197,882,183	184,397,514	204,264,784	274,803,955
Kredit bermasalah	8,671,900	15,069,308	32,315,448	15,133,632
Pendapatan bunga bersih	14,143,879	18,551,225	22,728,098	26,359,905
Laba sebelum pajak	6,374,673	2,916,584	7,932,063	12,671,335
Ekuitas	51,856,339	54,135,881	59,492,428	64,097,360
ATMR	100,643,531	105,233,110	130,675,878	201,503,928

Sumber: Data Sekunder ([bankkertiawan.com](http://bankkertiawan.com))

Berdasarkan data keuangan PT BPR Bank Kertiawan terlihat adanya peningkatan signifikan pada kredit bermasalah selama masa pandemi covid-19 terutama pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp32,3 miliar, lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan pada kualitas aset bank dan berdampak langsung pada laba sebelum pajak mengalami penurunan yang sangat tajam dari Rp6,37 miliar (2020) menjadi hanya Rp2,91 miliar (2021). Fenomena ini menggambarkan risiko kredit yang meningkat akibat pandemi, dimana bank harus meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk mengantisipasi potensi gagal bayar debitur. Peningkatan kredit bermasalah ini sejalan dengan dampak dari penerapan kebijakan restrukturisasi kredit yang diumumkan oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, sebagai tindakan *countercyclical* untuk mengatasi pengaruh pandemi covid-2019. Selain itu

pada tahun 2020 terdapat ketidakseimbangan antara kenaikan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang mencapai Rp 100,64 miliar dengan pertumbuhan modal atau ekuitas yang relatif kecil yakni hanya Rp51,86 miliar, yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal (CAR) bank. Jika peningkatan ATMR tidak diimbangi dengan penambahan modal, maka kapasitas bank dalam menyerap risiko menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya dilakukan penilaian atas tingkat kesehatan BPR Bank Kertiawan secara menyeluruh, terutama dari aspek risiko kredit dan permodalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank tetap berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan, serta mampu melanjutkan perannya sebagai penyedia layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat lokal, khususnya pasca pandemi.

Selama masa pandemi, BPR Bank Kertiawan menghadapi tantangan signifikan sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi basis penyaluran kredit seperti UMKM, perdagangan, dan pertanian. Salah satu dampak yang paling nyata adalah peningkatan signifikan pada kredit bermasalah yang mulai tampak pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp32,3 miliar. Meskipun demikian, BPR Bank Kertiawan tetap mampu mempertahankan kegiatan operasional dan menyalurkan kredit yang menunjukkan ketahanan lembaga dalam situasi krisis. Memasuki masa pemulihan pasca-pandemi (2022–2023), kinerja keuangan bank mulai menunjukkan tren pemulihan. Pada tahun 2023, laba sebelum pajak kembali mengalami peningkatan menjadi Rp4,04 miliar setelah sempat anjlok di tahun 2021. Selain itu, terjadinya penurunan NPL menjadi Rp26,6 miliar menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas kredit

melalui penagihan, restrukturisasi, maupun efisiensi pengelolaan risiko kredit. Disisi lain, total aset dan simpanan nasabah terus mengalami pertumbuhan, mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap BPR Bank Kertiawan sebagai lembaga keuangan lokal.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori stakeholder, yang menekankan pentingnya peran dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan organisasi. Dalam konteks BPR, para stakeholder mencakup nasabah (debitur dan deposan), pemegang saham, otoritas pengawas (OJK), serta masyarakat lokal sebagai penerima manfaat dari layanan keuangan. Ketika risiko kredit meningkat selama pandemi, kepercayaan stakeholder terhadap stabilitas bank ikut terganggu, yang dapat berdampak pada penurunan simpanan dan meningkatnya tekanan likuiditas. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi laporan keuangan, dan perbaikan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan para stakeholder. Dengan melakukan analisis tingkat kesehatan bank melalui pendekatan RGEK (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana BPR Bank Kertiawan menghadapi krisis dan merespons kepentingan stakeholder secara proporsional, baik selama masa krisis maupun dalam fase pemulihan setelah pandemi.

Sehubungan dengan upaya mendukung pemulihan ekonomi, BPR Bank Kertiawan memainkan peran strategis sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif lokal seperti UMKM,

pertanian dan perdagangan. Bank ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat bawah yang tidak selalu terjangkau oleh bank-bank konvensional. Oleh karena itu, tingkat kesehatan keuangan BPR Bank Kertiawan menjadi sangat penting untuk dijadikan indikator keberhasilan pemulihan ekonomi di level paling bawah. Evaluasi atas ketahanan dan kinerja BPR ini selama dan pasca pandemi juga dibutuhkan untuk menilai sejauh mana strategi manajemen risiko dan kebijakan penyaluran kredit telah dijalankan secara efektif dalam kondisi krisis.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana BPR Bank Kertiawan beradaptasi, bertahan, dan mulai pulih dari tekanan krisis. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam mengevaluasi kebijakan internal bank, serta memperkaya literatur akademik di bidang manajemen risiko dan ketahanan keuangan BPR, yang selama ini masih minim. Selain itu, studi ini juga relevan untuk memberikan masukan bagi otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan BPR, terutama di daerah-daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor informal dan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap tingkat kesehatan BPR Bank Kertiawan dengan menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) untuk menggambarkan secara objektif dinamika kinerja bank selama dan setelah pandemi COVID-19.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Perubahan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan terhadap stabilitas sektor perbankan, termasuk BPR Bank Kertiawan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kinerja dan tingkat kesehatan keuangan bank tersebut selama menghadapi krisis serta sejauh mana kemampuannya untuk pulih setelah pandemi. Dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, perlu dilakukan analisis komparatif untuk memahami bagaimana kinerja keuangan BPR Bank Kertiawan selama pandemi (2020-2021) dibandingkan dengan setelah pandemi (2022-2023).

## 1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari topik yang telah ditentukan, maka permasalahan dibatasi pada menganalisis kinerja keuangan PT BPR Bank Kertiawan dengan menggunakan metode RGEC pada periode 2020-2023.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kinerja keuangan PT BPR Bank Kertiawan dilihat dari faktor *risk profile, good corporate governance, earnings dan capital* selama periode 2020-2023?
- 2) Bagaimana perbandingan kondisi kesehatan PT BPR Bank Kertiawan pada periode selama pandemi (2020-2021) dan setelah pandemi (2022-2023)?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan PT BPR Bank Kertiawan selama periode 2020-2023 dilihat dari faktor *risk profile, good corporate governance, earnings dan capital*.
2. Untuk membandingkan kondisi kesehatan PT BPR Bank Kertiawan pada periode selama pandemi COVID-19 (2020-2021) dengan periode setelah pandemi (2022-2023).

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan rujukan terkait dengan pengembangan teori pada topik dalam penelitian ini. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami bagaimana metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) digunakan untuk menilai tingkat kesehatan sektor perbankan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan untuk menyalurkan dananya

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menilai kesehatan bank secara objektif, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih aman dalam menyimpan dana maupun mengajukan kredit. Informasi mengenai kinerja dan manajemen risiko bank membantu masyarakat sebagai nasabah maupun pelaku UMKM dalam memilih lembaga keuangan yang

terpercaya. Selain itu, penelitian ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas bank, sehingga tercipta sistem keuangan lokal yang lebih sehat, inklusif, dan berkeadilan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah terhadap teori-teori yang telah dipelajari dan diaplikasikan secara empiris ke dunia nyata dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

c. Bagi BPR Bank Kertiawan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih banyak kepada pihak bank untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja bank sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kinerja bank dan dapat dipergunakan untuk menetapkan sebuah strategi bisnis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga memberi manfaat dalam pengambilan keputusan. Dengan mengetahui perubahan pada rasio RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*), bank dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

